

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam penyerapan tenaga kerja sektor UMKM yang ada di Indonesia memegang peranan besar. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2019 jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 65,4 juta unit usaha. Jumlah tersebut mengindikasikan bahwa sektor UMKM berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu sekitar 123,3 ribu orang, sehingga sektor ini menjadi salah satu pilar penting dari perekonomian nasional. Dan berdasarkan laporan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada tahun 2023, jumlah UMKM mencapai 66 juta, UMKM juga menyerap sekitar 117 juta pekerja atau sekitar 97% dari total tenaga kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi UMKM dalam menyerap tenaga kerja yang dapat mengurangi angka pengangguran yang ada.

Meningkatnya sektor UMKM di Indonesia ditandai dengan bertambahnya jumlah pelaku usaha setiap tahunnya. Kondisi ini memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai sekitar 60,5%. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan guna memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian. Sejalan dengan hal tersebut, laporan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyebutkan bahwa pada tahun 2023, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai sekitar 61% atau setara dengan Rp9.580 triliun.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat untuk membantu pertumbuhan kawasan perkotaan terjadi di berbagai sektor, termasuk sektor formal dan informal. Sektor formal melibatkan bisnis atau pekerjaan yang beroperasi di bawah pengawasan institusi dan diatur oleh regulasi yang telah ditetapkan. Sebaliknya, sektor informal berfungsi tanpa badan pengawas dan tidak ada regulasi yang jelas di tempat. Di tengah dinamika kehidupan ramai kota, pedagang kaki lima hadir sebagai bagian penting yang mencerminkan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Keberadaan mereka tidak hanya

berfungsi sebagai penyedia berbagai kebutuhan melalui aktivitas perdagangan, tetapi juga mencerminkan ketahanan serta kemampuan adaptasi masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan kondisi ekonomi dan lingkungan (Haris et al., 2024; Octaviani & Puspitasari, 2021).

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha sektor informal yang berkembang di wilayah perkotaan. Populasi mereka cukup besar dan sering kali melebihi jenis usaha informal lainnya. Pedagang ini memanfaatkan trotoar pejalan kaki sebagai tempat berdagang atau menjual barang. Akibatnya, mereka dianggap menghalangi pergerakan pejalan kaki dan kendaraan. Pedagang kaki lima beroperasi di sektor informal, terlibat dalam perdagangan dan produksi, dengan beberapa berada di satu lokasi tetap sementara yang lain bergerak. Mereka mencerminkan bentuk kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh individu dengan modal terbatas, di mana para pedagang umumnya memperoleh pendapatan yang relatif terbatas dan digunakan terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. (Munawarah, 2022; Octaviani & Puspitasari, 2021).

Dari data yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Kuningan di tahun 2024 ada sebanyak 1.400 PKL yang ada di Kecamatan Kuningan. Dengan jumlah yang tidak sedikit itu menyebar di beberapa titik, seperti depan pusat perbelanjaan, pinggir jalan, pinggir-pinggir toko, dan dekat dengan pusat keramaian kota. Keberadaan pedagang kaki lima di berbagai lokasi yang dianggap strategis sering kali menimbulkan sejumlah permasalahan di lingkungan perkotaan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan munculnya kesan kumuh, mengganggu tata ruang perkotaan serta estetika kota (Octaviani & Puspitasari, 2022; Arsyad & Arifin, 2024). Dengan masalah yang ada maka perlu dilakukan pengambilan kebijakan yang sesuai. Agar kota juga tetap terjaga kebersihannya, akses transportasi tidak terhambat oleh pedagang kaki lima yang menempati trotoar bahkan sampai bahu jalan. Dan pedagang kaki lima juga tetap bisa menjajakan dagangan untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul, pemerintah perlu melakukan berbagai langkah strategis, salah satunya melalui perencanaan tata ruang kota. Perencanaan tersebut bertujuan untuk mengatur dan menata

wilayah perkotaan secara lebih sistematis dan terarah, sehingga keseimbangan lingkungan dapat terjaga serta tercipta kondisi yang nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas. (Arsyad dalam Ali, 2020). Salah satu bentuk pelaksanaan perencanaan ini adalah dengan mengatur berbagai faktor yang sering menyebabkan ketidakteraturan di kawasan perkotaan, seperti keberadaan pedagang kaki lima.

Penataan ruang kota dengan membuat kebijakan relokasi menimbulkan dampak psikologis dan ekonomis yang kompleks bagi PKL. Studi yang dilakukan oleh Umam & Salam (2020) di Kota Palu menunjukkan bahwa relokasi menyebabkan penurunan pendapatan signifikan pada fase awal akibat kehilangan pelanggan tetap, perubahan pola konsumsi masyarakat di lokasi baru, dan meningkatnya kompetisi antarpedagang. PKL menghadapi tantangan berat untuk beradaptasi dengan ekosistem ekonomi yang baru dan tidak familiar. Dalam konteks inilah, strategi adaptasi menjadi penentu kelangsungan hidup usaha. Strategi ini mencakup aspek konvensional seperti penentuan harga yang kompetitif dan memanfaatkan pengalaman usaha, serta aspek spiritual-normatif berupa penerapan prinsip-prinsip etika dalam berbisnis (Pratama & Wibowo, 2019).

Fenomena relokasi PKL di sekitar jl. Siliwangi sampai taman kota tentu bukan tanpa alasan. Pedagang kaki lima (PKL) di wilayah kota Kuningan ditertibkan oleh pemerintah setempat guna tata ruang kota lebih rapi, indah, dan nyaman, seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Dian Rachmat Yanuar dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Pengarah Relokasi PKL.

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Pedagang Kaki Lima Yang Di Relokasi**

| No | Lokasi              | Awal relokasi |
|----|---------------------|---------------|
| 1  | Puspa Taman Kota    | 116 PKL       |
| 2  | Puspa Siliwangi     | 133 PKL       |
| 3  | Puspa Langlangbuana | 118 PKL       |

*Sumber: Pemerintah Kab. Kuningan, (2025)*

Pusat Kuliner dan Parkir Siliwangi yang bisa disingkat menjadi Puspa merupakan salah satu tempat PKL direlokasi. PKL yang direlokasi pun dipecah

kedalam 3 tempat yaitu, Puspa taman kota, Puspa Siliwangi dan Puspa Langlangbuana. Awalnya Puspa Siliwangi ini merupakan kampus SDN 17 Kuningan. Pemindahan PKL ke lokasi Puspa Siliwangi diantisipasi mampu membentuk zona ekonomi komunitas yang terintegrasi sekaligus menghargai peran PKL sebagai pendorong utama aktivitas ekonomi rakyat.

Peluncuran Puspa Siliwangi dimanfaatkan sebagai titik awal bagi kelanjutan upaya pengelolaan urban demi memacu kemajuan ekonomi masa mendatang, termasuk program pembentukan kelompok sementara atau lembaga pengawas dari Pemda Kuningan untuk menangani pengoperasian area tersebut. Dengan keberadaan lembaga pengawas ini, keteraturan di Puspa Siliwangi dipastikan akan terlaksana secara optimal, di samping harapan agar wilayah itu berkembang menjadi pusat perdagangan digital di mana seluruh operasional difokuskan pada mekanisme pembayaran tanpa tunai, yang akan digulirkan melalui kampanye edukasi bersama para penjual.

Peresmian relokasi dilakukan pada tanggal 19 April 2025 sekaligus relokasi awal PKL dilakukan. Terhitung sudah 1 tahun lebih relokasi PKL ini berjalan. Namun pasca relokasi dilakukan, berdasarkan hasil observasi awal peneliti pada tanggal 5 september 2025 beberapa pedagang mengeluhkan omset penjualan yang turun drastis hingga 90%. Dan adanya penurunan jumlah pedagang di Puspa Siliwangi, karena kurangnya pengunjung di Puspa Siliwangi. Penurunan pengunjung ini menurut beberapa pedagang karena adanya sistem pemberlakuan parkir menggunakan portal.

Menurut JDIH Kemenkeu harga jual merupakan sejumlah uang yang ditetapkan penjual kepada pembeli sebagai imbalan atas suatu barang. Jumlah ini sudah mencakup seluruh biaya yang terkait, namun tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dihitung secara terpisah. Sebuah studi yang dilakukan oleh Huninhatu et al., (2023) terhadap pedagang barang kebutuhan pokok menunjukkan bahwa harga jual memiliki dampak yang nyata dan positif terhadap besarnya pendapatan. Hal ini mengisyaratkan bahwa strategi harga yang bersaing, namun tetap menjaga kualitas produk, mampu merangsang pertumbuhan permintaan.

Bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang baru saja direlokasi dan harus beradaptasi dengan lingkungan persaingan yang baru, kecakapan dalam menetapkan harga yang sesuai dengan target pasar menjadi faktor kunci untuk mempertahankan bahkan meningkatkan arus pendapatan di tempat usaha yang baru. Menurut hukum permintaan jika harga suatu barang murah maka permintaan akan naik begitu sebaliknya, jika harga suatu barang mahal maka permintaan akan turun. Beberapa PKL bahkan menurunkan harga jualnya agar bisa menarik pelanggan, demi kelangsungan usahanya.

Lama usaha merupakan faktor penting yang turut menentukan tingkat pendapatan. Semakin lama seseorang menjalankan usahanya, umumnya mereka akan mengembangkan strategi yang lebih matang dan efektif dalam mengelola operasional, memproduksi barang, hingga memasarkan produk. Hal ini dimungkinkan karena pedagang tersebut telah memiliki bekal pengalaman, pengetahuan mendalam tentang pasar, serta kemampuan mengambil keputusan yang tepat dalam berbagai situasi (Setiaji & Ana, 2018).

PKL yang berdagang di area tersebut sebelumnya telah berjualan hingga puluhan tahun. Dan berjualan di area puspa siliwangi sudah berjalan 1 tahun lebih. Beberapa bulan setelah direlokasi terjadi penurunan jumlah pedagang dari 133 menjadi 91 PKL yang masih aktif berjualan. Banyak pedagang yang gulung tikar, dan tidak aktif berjualan selama berbulan-bulan dikarenakan keterbatasan modal serta lebih memilih berjualan disekitar rumah saja. Para pedagang mengambil langkah tersebut karena terjadinya penurunan pendapatan yang sangat drastis.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji variabel-variabel ini secara terpisah. Bahwa strategi penetapan harga jual yang tepat dapat meningkatkan volume penjualan dan pendapatan UMKM (Huninhatu et al., 2023; Kholil, N.D.; Mohammad, 2024). Sementara itu, menurut hasil penelitian Ferayani & Widayanti (2023) bahwa lama usaha yang mencerminkan pengalaman dan ketahanan berwirausaha berpengaruh positif terhadap pendapatan PKL. Disisi lain, penelitian yang dilakukan Widiyanti & Octavia (2024) Penelitian tersebut menunjukan hasil bahwa relokasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

pendapatan bulanan pedagang kaki lima pakaian. Yang mana relokasi ini berpengaruh signifikan terhadap penurunan pendapatan pedagang.

Namun, celah penelitian yang masih ada adalah inkonsistensi hasil penelitian. Bahwa menurut, Huninhatu et al., (2023) variabel harga jual memiliki pengaruh yang signifikan. Sedangkan, menurut Noveria & Kusmawati, (2023) variabel harga jual tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dan celah penelitian lain juga belum terdapat penelitian yang mengintegrasikan ketiga variabel tersebut (secara simultan untuk dianalisis pengaruhnya terhadap pendapatan PKL. Studi-studi sebelumnya cenderung terfokus pada satu atau dua variabel saja dan belum menyentuh konteks spesifik di Puspa Siliwangi.

Penelitian ini dilakukan selama periode kritis (1 tahun setelah relokasi), di mana proses adaptasi PKL masih berada pada fase yang membedakan antara bertahan dan gulung tikar. Hasil penelitian akan relevan untuk mengevaluasi fase awal dari kebijakan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji relokasi sebagai variabel kebijakan, tetapi juga menganalisis strategi mikroekonomi yang digunakan oleh PKL (harga jual) serta modal non-finansial (lama usaha/pengalaman) sebagai respons terhadap kebijakan tersebut. Hal ini menawarkan perspektif yang lebih holistik.

Pemilihan Puspa Siliwangi bukan hanya karena lokasi peneliti yang dekat, tetapi karena lokasi ini menawarkan laboratorium kebijakan yang ideal. Puspa Siliwangi merepresentasikan pendekatan pemerintah daerah yang modern dalam menangani PKL. Menelitinya memberikan pengetahuan, mengenai kebijakan publik dan ekonomi pembangunan perkotaan tentang faktor-faktor penentu keberhasilan atau kegagalan relokasi terencana.

Penelitian ini perlu dilakukan sekarang karena beberapa alasan seperti tepatnya momentum evaluasi kebijakan dikarenakan baru berjalan 1 tahun. Ini adalah *window of opportunity* yang kritis untuk mengevaluasi dampak kebijakan. Data yang dikumpulkan sekarang akan merekam kondisi transisi dan adaptasi. Jika ditunggu 2-3 tahun lagi, mungkin hanya akan menyisakan PKL yang benar-benar tangguh (*survivorship bias*), sementara data tentang mengapa banyak PKL yang memilih berhenti akan hilang. Penurunan

pendapatan hingga 90% dan pengurangan jumlah pedagang dari 133 menjadi 91 adalah lampu merah. Jika tidak segera diteliti dan dicarikan solusi, dampaknya bisa permanen seperti kemiskinan, pengangguran, dan kegagalan investasi pemerintah dalam pembangunan Puspa Siliwangi.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang dikaji, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut. **“Pengaruh Harga Jual, Lama Usaha Dan Relokasi Terhadap Pendapatan PKL Di Pusat Kuliner Dan Parkir Siliwangi Kabupaten Kuningan”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latarbelakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka masalah diatas di identifikasikan sebagai berikut:

1. Adanya penurunan jumlah pedagang kaki lima (PKL) pasca-relokasi di Puspa Siliwangi, yang mengindikasikan adanya masalah adaptasi atau daya tarik lokasi baru.
2. Relokasi dapat mengakibatkan pedagang kaki lima kehilangan pelanggan tetap yang sebelumnya menjadi sumber utama transaksi. Selain itu, mereka juga harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang belum dikenal, sehingga kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap tingkat pendapatan.
3. Adanya pemberlakuan tiket parkir pengunjung Puspa yang menurunkan minat pengunjung. Sehingga berkurangnya pendapatan pedagang karena berkurangnya pengunjung.
4. Banyak pedagang yang gulung tikar karena pendapatan mereka tidak menutupi modal yang dikeluarkan, sehingga harus menggunakan uang tabungan untuk terus berjualan setiap harinya. Apalagi PKL yang berjualan makanan, karena stok bahan baku harus baru setiap harinya.
5. Beberapa pedagang sampai menurunkan harga, agar produk mereka terjual.
6. Perbedaan penempatan lokasi di Puspa Siliwangi Kabupaten Kuningan memengaruhi aksesibilitas pembeli.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang serta identifikasi permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menetapkan beberapa batasan masalah. Batasan ini membantu dalam mengidentifikasi aspek-aspek utama dari masalah yang diangkat tanpa menyimpang ke area yang tidak diperlukan. Dalam penelitian ini;

1. Penelitian hanya difokuskan pada PKL yang telah direlokasi ke Puspa Siliwangi Kabupaten Kuningan. Dan responden pada penelitian ini adalah PKL yang berjualan di Puspa Siliwangi.
2. Variabel independen yang diteliti terbatas pada harga jual, lama usaha, dan relokasi, sedangkan variabel dependennya adalah pendapatan PKL.
3. Periode penelitian dilakukan maksimal selama 6 bulan, mulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Maret.

### **D. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah ini antara lain sebagai berikut:

1. Apakah harga jual berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan PKL di pusat kuliner dan parkir siliwangi Kabupaten Kuningan?
2. Apakah lama usaha berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan PKL di pusat kuliner dan parkir siliwangi Kabupaten Kuningan?
3. Apakah relokasi berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan PKL di pusat kuliner dan parkir siliwangi Kabupaten Kuningan?
4. Apakah harga jual, lama usaha dan relokasi berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan PKL di pusat kuliner dan parkir siliwangi Kabupaten Kuningan?

### **E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga jual secara parsial terhadap pendapatan PKL di pusat kuliner dan parkir siliwangi Kabupaten Kuningan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lama usaha secara parsial terhadap pendapatan PKL di pusat kuliner dan parkir siliwangi Kabupaten Kuningan
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh relokasi secara parsial terhadap pendapatan PKL di pusat kuliner dan parkir siliwangi Kabupaten Kuningan.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga jual, lama usaha, dan relokasi secara simultan terhadap pendapatan PKL di pusat kuliner dan parkir siliwangi Kabupaten Kuningan.

## **2. Manfaat**

Mengenai kegunaan dari penelitian itu adalah:

### **a. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya pada bidang mikroekonomi dan ekonomi pembangunan, terutama dalam memahami perilaku ekonomi pada pelaku usaha mikro.

Penelitian ini dapat memperkuat landasan empiris mengenai faktor-faktor penentu pendapatan pelaku usaha mikro, khususnya dalam situasi disruptif seperti relokasi, yang masih jarang dikaji dengan pendekatan integrative.

Dapat menjadi bahan rujukan dan dasar untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan strategi adaptasi usaha mikro pasca kebijakan pemerintah atau dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan.

### **b. Secara Praktis**

#### **1) Bagi Mahasiswa**

Sebagai bentuk penerapan pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan serta untuk mengembangkan kemampuan dalam melaksanakan penelitian ilmiah secara sistematis.

#### **2) Bagi PKL**

Sebagai bahan evaluasi dalam menyusun strategi usaha yang lebih adaptif. Memberikan gambaran dan wawasan tentang strategi adaptasi yang efektif pasca relokasi, khususnya mengenai pentingnya menetapkan harga yang kompetitif, memanfaatkan pengalaman usaha, dan mengupayakan pendapatan agar stabil ditengah pemindahan lokasi agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup.

3) Bagi Pemerintah Daerah

Dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan lanjutan terkait penataan dan pemberdayaan PKL pasca-relokasi, tidak hanya dari aspek tata ruang tetapi juga dari aspek pendampingan ekonomi pasca-relokasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

4) Bagi Pihak Akademik

Menjadi referensi dan studi kasus untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan PKL (Pedagang Kaki Lima), dan kewirausahaan dalam konteks kebijakan publik.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini, diperlukan struktur yang sistematis agar memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian yang disajikan. Oleh karena itu, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah penelitian, serta diidentifikasi masalah penelitian dari latar belakang, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Bab ini kemudian ditutup dengan penjelasan mengenai sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini dijelaskan dasar teori yang mendasari perumusan hipotesis dan analisis penelitian. Selain itu, bab

ini juga menjelaskan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini dijelaskan variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, serta metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penelitian, gambaran khusus mengenai tempat penelitian, objek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V :PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian sebagai bagian akhir dari penelitian, implikasi serta memuat saran terkait dengan hasil penelitian dan bagian penutup.